

DAFTAR PUSAKA

A. Buku /Literatur

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Biography Publising, 2001.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Tangerang: Ghalia Indonesia, 2004.

E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Stori Grafika, 2001.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta: Erlangga, 1983.

Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

_____, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

_____, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

_____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2011.

- H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Komar Andasmita, *Notaris I*, Bandung: Sumur, 1984.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994.
- Muclis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Jakarta: Watampone Press, 2003.
- Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia dulu, sekarang dan Masa Depan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.).

C. Tesis

Nurdiana Fitria, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Profesi Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012.

Yoseph Bambang Dwi Atmojo, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris yang Melakukan pelanggaran Kode Etik di Kota Surakarta*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

